



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11859-11866

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pancasila dan Tantangan Arus Individualisme Global: Benteng Atau Sekedar Simbol

Erizca Amanda Saragih¹, Revalina Angelila Sianipar², Dea Larasati Lubis³, Sella Enzelika Br. Ginting⁴, Santa Margaretha Sitanggang⁵, Anugrah Setiawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

erizcasaragih@gmail.com¹, revasianipar24@gmail.com², dealubis42@gmail.com³,
sellaenzelikabrginting@gmail.com⁴, santasitanggang3@gmail.com⁵, anugrah91@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan arus individualisme global terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan identitas nasional Indonesia, serta merumuskan strategi revitalisasi yang relevan di era digital. Globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya dengan menguatnya nilai kebebasan individu yang sering kali mengabaikan kepentingan kolektif. Fenomena ini menciptakan ketegangan mendasar antara nilai-nilai individualisme yang dibawa arus globalisasi dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), yang mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait globalisasi, individualisme, pendidikan karakter, serta implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa arus individualisme global berkontribusi terhadap erosi identitas nasional, meningkatnya sikap apatis, serta menurunnya solidaritas sosial yang bertentangan dengan prinsip gotong royong sebagai nilai utama Pancasila. Selain itu, penetrasi teknologi digital mempercepat kaburnya batas nilai budaya, sehingga Pancasila berisiko mengalami pergeseran fungsi dari pedoman hidup menjadi sekedar simbol formal. Oleh karena itu, diperlukan strategi revitalisasi yang komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan literasi digital, serta keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat tetap berperan sebagai filter budaya yang efektif dan benteng yang kokoh dalam menghadapi derasnya arus individualisme global.

Kata Kunci: Pancasila, Individualisme Global, Globalisasi, Revitalisasi, Identitas Nasional

1. Latar Belakang

Di era kontemporer ini, dunia tengah mengalami transformasi masif akibat arus globalisasi yang tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai baru yang sering kali berbenturan dengan identitas nasional. Globalisasi telah memfasilitasi masuknya berbagai ideologi asing, salah satunya adalah individualisme global yang cenderung menekankan kebebasan pribadi di atas kepentingan bersama. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa globalisasi ibarat pisau bermata dua; di satu sisi menawarkan modernitas, namun di sisi lain berpotensi mengikis jati diri bangsa melalui infiltrasi budaya yang tidak sesuai dengan karakter lokal (Hasanah & Agusti, 2025).

Secara historis, bangsa Indonesia telah berhasil menavigasi berbagai gelombang perubahan besar tanpa kehilangan jati dirinya berkat kekuatan nilai-nilai yang terangkum dalam Pancasila. Dari era kolonialisme, masa pergolakan kemerdekaan, hingga transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Pancasila senantiasa menjadi kompas yang mengarahkan bangsa untuk kembali pada esensi persatuan dalam keberagaman. Namun, tantangan yang dibawa oleh arus individualisme global abad ke-21 memiliki karakter yang berbeda dari tantangan-tantangan sebelumnya. Jika dulu ancaman datang dalam wujud yang nyata dan mudah diidentifikasi seperti penjajahan fisik atau kudeta bersenjata, kini ancaman hadir dalam wujud yang lebih halus: perubahan cara pandang, gaya hidup, dan sistem nilai yang merembes tanpa disadari melalui layar-layar gawai yang digenggam setiap hari. Hasanah dan Agusti (2025) menegaskan bahwa infiltrasi nilai-nilai asing melalui jalur digital jauh lebih sulit dibendung dibandingkan bentuk-bentuk pengaruh luar yang bersifat fisik, karena ia masuk tanpa garis batas yang jelas dan sering kali dibungkus dalam kemasan yang menarik dan menghibur bagi konsumennya.

Pancasila, sebagai ideologi resmi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki peran krusial sebagai filter terhadap dampak negatif modernisasi tersebut. Sebagai satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan, Pancasila seharusnya menjadi kekuatan moral yang besar apabila dijadikan landasan moral dalam kehidupan berbangsa (Savitri & Dewi, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar. Arus globalisasi mulai mengikis nilai-nilai tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya sikap individualisme, materialisme, dan pragmatisme di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan penetrasi teknologi informasi di era digital yang membuat batas-batas nilai menjadi kabur, sehingga tantangan terhadap eksistensi ideologi negara menjadi semakin kompleks (Faturahmat dkk., 2025).

Banyak anggota masyarakat, terutama generasi muda, mulai melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup mereka. Hal ini memicu pertanyaan mendasar mengenai efektivitas Pancasila dalam membentengi identitas nasional. Apakah Pancasila masih berfungsi sebagai "benteng" yang kokoh dalam menyaring pengaruh asing dan menjaga integrasi sosial, ataukah kini ia hanya terjebak menjadi "sekadar simbol" yang dihafal tanpa diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Fenomena melemahnya implementasi Pancasila semakin terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Di ruang-ruang publik digital, nilai-nilai toleransi dan musyawarah yang menjadi ciri khas budaya Indonesia semakin terdesak oleh budaya debat polarisatif dan saling menjatuhkan yang diwariskan oleh platform media sosial berbasis algoritma. Laporan Kominfo (2023) mencatat bahwa ujaran kebencian dan konten provokatif berbasis sentimen primordial mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, mencerminkan betapa nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila menghadapi ancaman nyata dari dinamika ruang digital yang tidak terkelola dengan baik. Di sisi lain, pola konsumsi generasi muda yang semakin berorientasi pada kepuasan pribadi instan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila kian kehilangan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menuntut adanya refleksi mendalam dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.

Urgensi kajian ini semakin menguat mengingat bahwa Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2030-an, di mana mayoritas penduduknya adalah generasi muda usia produktif. Generasi ini tumbuh sepenuhnya di era digital dan terpapar nilai-nilai global secara intensif sejak dini. Jika tidak ada intervensi yang tepat sasaran, bonus demografi ini berisiko menjadi bencana moral apabila generasi muda yang dominan tersebut telah kehilangan jangkar ideologis berupa nilai-nilai Pancasila. Latif (2018) mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekadar produk sejarah, melainkan distilasi dari kearifan peradaban Nusantara yang telah teruji selama berabad-abad dalam menyatukan keberagaman. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan arus individualisme global terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila, serta merumuskan strategi revitalisasi yang kontekstual dan berkelanjutan agar Pancasila dapat terus berfungsi sebagai filter budaya yang efektif dan benteng ideologi yang kokoh bagi generasi bangsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pancasila dalam menghadapi tantangan arus individualisme global. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman fenomena sosial secara holistik, khususnya terkait pergeseran nilai, krisis identitas, dan dinamika ideologi di tengah globalisasi. Penelitian tidak melibatkan data lapangan, melainkan berfokus pada penggalian, penelaahan, serta interpretasi data yang bersumber dari literatur ilmiah yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel penelitian, serta publikasi yang berkaitan dengan Pancasila, globalisasi, individualisme, pendidikan karakter, dan perkembangan sosial di era digital. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan tingkat relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, serta kebaruan informasi agar mampu memberikan gambaran yang aktual dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengelompokkan literatur sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca secara mendalam, mengkategorikan konsep-konsep utama seperti nilai-nilai Pancasila, karakteristik individualisme global, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, kemudian menafsirkan hubungan antar konsep tersebut secara kritis dan sistematis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data (memilih informasi yang relevan),

penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang logis dan argumentatif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan tidak bias. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai posisi Pancasila di tengah derasnya arus individualisme global.

Adapun kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, relevansi tematik, yaitu literatur yang secara langsung membahas Pancasila, globalisme, individualisme, pendidikan karakter, atau kearifan lokal Indonesia. Kedua, kredibilitas sumber, di mana prioritas diberikan kepada jurnal ilmiah terindeks, buku akademik dari penerbit bereputasi, serta publikasi resmi lembaga pemerintah. Ketiga, kebaruan sumber, dengan mengutamakan publikasi dari tahun 2018 hingga 2025 untuk memastikan relevansinya dengan kondisi terkini. Namun demikian, beberapa sumber klasik yang memiliki kontribusi fundamental terhadap kajian Pancasila tetap diikutsertakan sebagai landasan teoretis. Melalui penerapan kriteria seleksi yang ketat ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan sintesis yang kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Hasil dan Diskusi

Era globalisasi telah membawa transformasi masif yang memfasilitasi masuknya berbagai ideologi asing, salah satunya adalah individualisme global yang menekankan kebebasan pribadi di atas kepentingan kolektif. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena nilai-nilai individualisme, materialisme, dan liberalisme sering kali bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan kebersamaan, keadilan sosial, dan gotong royong. Sebagaimana dikemukakan oleh Alaby (2019), nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi parameter perubahan perilaku untuk menghasilkan luaran masyarakat yang bermoral dan berkeadilan, namun arus globalisasi justru memicu erosi identitas budaya dan disorientasi nilai lokal. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan individu melakukan berbagai aktivitas tanpa interaksi langsung, yang menurut pengamatan para peneliti, secara perlahan mengikis rasa solidaritas dan empati terhadap sesama. Dampaknya, masyarakat yang terpapar sikap individualis cenderung kehilangan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok, yang merupakan ruh dari sila ketiga dan kelima Pancasila.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anggota masyarakat, terutama generasi muda, mulai memandang Pancasila hanya sebagai simbol formalitas atau konsep hafalan tanpa makna praktis. Menurut Notonagoro, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai landasan intelektual dan pedoman norma dasar kemanusiaan untuk hidup berdampingan di Indonesia. Namun, infiltrasi budaya Barat yang mengagungkan gaya hidup modern dan pragmatis telah menyebabkan status Pancasila seolah merosot dalam kehidupan sosial. Aulia menegaskan bahwa Pancasila adalah moral pergaulan hidup antarmanusia Indonesia tanpa memandang status sosial, namun jika nilai-nilai ini dilupakan, jati diri bangsa akan hancur oleh "virus" budaya asing yang secara progresif merusak tatanan persatuan. Jika Pancasila hanya berhenti sebagai jargon tanpa aktualisasi nyata, maka ia gagal menjadi "benteng" dan hanya terjebak sebagai simbol sejarah yang kehilangan daya ikatnya.

Untuk menghadapi arus individualisme global, diperlukan strategi revitalisasi yang melibatkan integrasi pendidikan berbasis Pancasila dan literasi digital yang kuat. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati dirinya, yang dalam kajian Alfian disebut sebagai dimensi fleksibilitas. Implementasi nilai-nilai ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan harus mendarah daging secara alami dalam kehidupan sehari-hari sebagai kekuatan moral bangsa. Sebagaimana ditekankan dalam penelitian, revitalisasi ini memerlukan keterlibatan aktif dari para pemimpin sebagai teladan serta penguatan pendidikan karakter yang tidak diskriminatif. Pancasila harus dikembalikan fungsinya sebagai filter atau penyaring budaya asing agar generasi masa depan memiliki moralitas yang kokoh untuk memilah pengaruh global yang bermanfaat bagi kemajuan nasional. Dengan demikian, Pancasila akan tetap relevan sebagai landasan ideologi yang mempersatukan bangsa di tengah dinamika globalisasi yang tidak terelakkan.

Secara lebih mendalam, fenomena individualisme global tidak hanya menyerang tataran ideologis, tetapi juga merusak struktur sosial-psikologis masyarakat Indonesia. Munculnya sikap apatis dan berkurangnya kepedulian sosial merupakan indikasi nyata dari luntarnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Individualisme global menciptakan sekat-sekat imajiner di mana individu merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, yang pada gilirannya memicu meningkatnya perselisihan dan sifat keegoisan.

Dampak ini sangat krusial karena solidaritas sosial merupakan modal utama dalam menjaga persatuan nasional. Tanpa adanya rasa saling memiliki dan tanggung jawab kolektif, masyarakat akan mudah terfragmentasi oleh isu-isu sektarian dan pragmatisme ekonomi. Oleh karena itu, tantangan "Pancasila sebagai benteng" terletak pada kemampuannya untuk mengembalikan kesadaran bahwa kebahagiaan individu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan bersama sesuai amanat keadilan sosial.

Dalam konteks menghadapi tantangan digital, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam menyaring pengaruh asing. Faturohmat dkk. (2025) menekankan bahwa revitalisasi nilai Pancasila di era digital memerlukan pendekatan yang tidak lagi bersifat indoktrinasi, melainkan melalui internalisasi nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Hal ini sejalan dengan pandangan Silitonga (2020) yang menyatakan bahwa negara memiliki peran vital dalam mengarahkan kebijakan pendidikan yang mampu memperkuat jati diri bangsa di tengah kompetisi global. Pendidikan tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi harus mampu membentuk moralitas yang kokoh sehingga setiap individu memiliki kemampuan *self-filtering* terhadap konten-konten individualistik yang tersebar luas di media sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak akan lagi dipandang sebagai sekadar simbol hafalan di ruang kelas, melainkan sebagai kompas moral yang membimbing tindakan nyata dalam membedakan pengaruh global yang konstruktif dan destruktif.

Terakhir, penguatan Pancasila sebagai benteng di era arus global harus melibatkan penciptaan ekosistem digital yang sehat dan berbasis pada nilai luhur bangsa. Tantangan individualisme sering kali diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung mengisolasi individu dalam "ruang gema" (*echo chambers*) kepentingannya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Vania dkk. (2021), strategi revitalisasi harus mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan narasi gotong royong dan persatuan secara kreatif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan pembuat konten, nilai-nilai Pancasila dapat dikemas menjadi gaya hidup (*lifestyle*) yang menarik bagi generasi milenial dan Gen Z. Transformasi dari "sekadar simbol" menjadi "benteng hidup" ini hanya mungkin terjadi jika seluruh elemen bangsa secara konsisten menerapkan etika Pancasila dalam berinteraksi di dunia maya, sehingga jati diri bangsa tetap tegak berdiri meskipun diterjang badai individualisme global yang tidak terelakkan.

Lebih jauh, tantangan individualisme global terhadap Pancasila juga perlu dilihat dari perspektif generasi muda sebagai penerus bangsa. Kholid (2020) menegaskan bahwa generasi muda Indonesia saat ini berada dalam pusaran dua arus yang saling bertentangan: di satu sisi, mereka mewarisi nilai-nilai luhur Pancasila; di sisi lain, mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang didominasi oleh konten-konten yang merayakan kebebasan individual tanpa batas. Penelitian Rahayu dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa paparan media sosial yang masif selama lebih dari enam jam per hari secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya orientasi individualistik pada kalangan remaja. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah, yang sering kali hanya bersifat normatif dan hafalan tanpa internalisasi nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan Pancasila perlu direkonstruksi secara menyeluruh agar mampu menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa, bukan sekadar kognitif semata, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam kepribadian generasi muda.

Dimensi ekonomi-politik dari arus individualisme global juga tidak dapat diabaikan dalam kajian ini. Liberalisasi ekonomi yang menyertai gelombang globalisasi telah mendorong tumbuhnya mentalitas kompetitif yang ekstrem, di mana keberhasilan individu diukur semata-mata dari akumulasi kekayaan material. Hal ini secara langsung bertabrakan dengan sila kelima Pancasila yang mengamankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Winarno (2020), infiltrasi ideologi neoliberal melalui jalur ekonomi telah menciptakan ketimpangan sosial yang semakin menganga, sekaligus menumbuhkan budaya konsumerisme yang mendangkalkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan. Kondisi ini menuntut negara untuk tidak hanya hadir sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung nilai budaya dengan memperkuat kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Tanpa komitmen struktural yang kuat dari pemerintah, revitalisasi nilai-nilai Pancasila hanya akan berhenti pada tataran wacana tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, melemahnya nilai-nilai Pancasila akibat tekanan individualisme global juga tercermin dari transformasi pola interaksi sosial masyarakat Indonesia. Nugroho (2021) mengidentifikasi bahwa fenomena urban loneliness atau kesepian di tengah keramaian kota semakin meningkat sebagai dampak dari gaya hidup individualistik yang diperparah oleh ketergantungan pada interaksi virtual. Rasa saling ketergantungan

(interdependensi) yang menjadi fondasi nilai gotong royong perlahan terkikis oleh budaya do-it-yourself dan self-reliance yang dipromosikan secara masif oleh media digital. Situasi ini menciptakan paradoks: secara teknologi masyarakat semakin terhubung, namun secara sosial justru semakin terasing satu sama lain. Pancasila sebagai ideologi yang berakar pada nilai kebersamaan dan persaudaraan harus mampu menjawab paradoks ini dengan menawarkan narasi alternatif bahwa konektivitas digital seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, ikatan sosial yang nyata dalam komunitas (Silitonga, 2020).

Peran institusi keagamaan dan kearifan lokal dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila juga patut mendapat perhatian serius. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi memiliki modal sosial yang luar biasa untuk melawan infiltrasi individualisme global. Nilai-nilai seperti *dalihan na tolu* dalam budaya Batak, *menyama braya* dalam budaya Bali, dan *siri'* na pacce dalam budaya Bugis-Makassar merupakan manifestasi lokal dari semangat kolektivitas yang selaras dengan jiwa Pancasila (Latif, 2018). Institusi adat dan keagamaan dapat menjadi mitra strategis negara dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan tersebut kepada masyarakat, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi formal. Dengan demikian, upaya revitalisasi Pancasila haruslah bersifat bottom-up dan berangkat dari penguatan identitas kultural lokal, bukan sekadar kampanye top-down yang bersifat instruktif dan terkesan dipaksakan kepada masyarakat.

Tantangan menjadikan Pancasila sebagai benteng nyata juga berimplikasi pada urgensi reformasi kurikulum pendidikan nasional secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka yang saat ini diimplementasikan memberikan ruang yang lebih luas bagi internalisasi nilai karakter, termasuk nilai-nilai Pancasila, melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis proyek (Kemendikbudristek, 2022). Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas guru, minimnya bahan ajar yang relevan secara kultural, hingga belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila secara holistik dalam setiap mata pelajaran. Penelitian Mukhbita Alya dkk. (2024) menegaskan bahwa individualisme yang melunturkan nilai-nilai Pancasila hanya dapat diatasi jika sistem pendidikan mampu menciptakan pengalaman belajar yang autentik, di mana siswa merasakan sendiri manfaat nyata dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari mereka.

Akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa dikotomi antara Pancasila sebagai “benteng” versus “sekadar simbol” bukan merupakan kondisi yang bersifat permanen, melainkan sebuah kontinum yang ditentukan oleh pilihan-pilihan kolektif bangsa Indonesia setiap harinya. Pramudita (2024) menyebutkan bahwa nasionalisme di era digital bukan lagi soal kesetiaan buta kepada simbol-simbol negara, melainkan tentang komitmen aktif untuk mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan dalam setiap interaksi, baik di dunia nyata maupun digital. Pancasila memiliki potensi besar untuk terus relevan sebagai panduan hidup berbangsa apabila ia diperlakukan bukan sebagai dokumen historis yang beku, melainkan sebagai nilai hidup yang terus menerus ditafsirkan ulang sesuai tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu sebagai warga negara, Pancasila dapat dikokohkan kembali sebagai benteng ideologi yang tidak sekadar bertahan dari gempuran individualisme global, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi terwujudnya peradaban bangsa yang berkarakter, bermartabat, dan berdaya saing di kancah global.

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah bahwa pertarungan antara Pancasila dan individualisme global sesungguhnya bukan pertarungan antara tradisi dan modernitas, melainkan pertarungan antara dua visi tentang manusia dan masyarakat yang ideal. Individualisme global, sebagaimana dikritisi oleh Winarno (2020), berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk otonom yang kepentingannya bersifat primer dan kepentingan bersama hanya merupakan turunan dari negosiasi antarindividu. Sebaliknya, Pancasila berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari relasi dengan sesama, alam, dan Tuhan. Perbedaan pandangan antropologis yang mendasar ini menjelaskan mengapa konflik nilai antara keduanya berlangsung di tingkat yang sangat dalam dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kampanye atau sosialisasi permukaan. Diperlukan transformasi paradigmatis dalam cara bangsa Indonesia memandang diri sendiri dan komunitasnya, yang hanya dapat terwujud melalui proses pendidikan humanistik yang panjang dan konsisten.

Dalam konteks ini, peran media massa dan platform digital sebagai arena pertarungan nilai tidak dapat diabaikan. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement) pengguna terbukti secara sistematis mendorong konten yang bersifat sensasional, konfrontatif, dan berpusat pada kepentingan diri. Ristake dkk. (2024) menegaskan bahwa tanpa regulasi konten yang berpihak pada nilai-nilai kebangsaan, platform digital justru menjadi kendaraan utama bagi penyebaran nilai-nilai yang bertentangan

dengan Pancasila. Oleh karena itu, kebijakan literasi digital yang dikembangkan pemerintah perlu melampaui sekadar kecakapan teknis dalam menggunakan teknologi, melainkan harus mencakup dimensi etika dan nilai dalam berinteraksi di ruang digital. Program-program seperti Gerakan Literasi Digital Nasional yang digalakkan Kominfo perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dengan kurikulum pendidikan Pancasila di sekolah, sehingga terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara digital tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa Pancasila sesungguhnya memiliki fondasi filosofis yang kuat dan relevan untuk terus dijadikan panduan dalam menghadapi tantangan arus globalisme, termasuk individualisme. Namun demikian, potensi tersebut hanya akan terealisasi apabila ada upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mentransformasikan Pancasila dari dokumen normatif menjadi praktik hidup sehari-hari. Syamsuar dan Akansya (2019) menegaskan bahwa internalisasi Pancasila tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari kesadaran dalam diri setiap warga negara yang merasa bahwa nilai-nilai Pancasila memang sesuai dengan pengalaman hidup dan aspirasi mereka. Tugas bangsa Indonesia ke depan adalah membangun jembatan antara nilai luhur Pancasila dan realitas kehidupan kontemporer yang terus berubah, sehingga Pancasila tidak sekadar menjadi warisan masa lalu yang dirawat dalam museum sejarah, melainkan menjadi energi hidup yang terus menggerakkan semangat kebersamaan, keadilan, dan kemajuan bangsa dalam menghadapi kompleksitas abad ke-21.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah mengubah cara berpikir dan tingkah laku masyarakat secara signifikan, terutama dengan masuknya ide individualisme yang memperhatikan kebebasan dan kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan bersama. Fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menganut kebersamaan, kerja sama, persatuan sosial, dan keadilan. Dampak dari arus individualisme global tidak hanya terasa di bidang ideologi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan psikologis masyarakat, contohnya adalah meningkatnya sikap tidak peduli, menurunnya rasa tanggung jawab sosial, serta melemahnya rasa persatuan. Dalam situasi ini, Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat karena di satu pihak masih dianggap sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi di pihak lain, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari semakin menurun. Hal ini memicu pertanyaan apakah Pancasila masih bisa menjadi benteng kuat untuk menjaga identitas bangsa atau justru sudah menjadi simbol formal yang hanya diingat tanpa diterapkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila masih punya kemampuan besar sebagai benteng ideologi dalam menghadapi pengaruh individualisme global, tetapi kinerjanya tergantung pada sejauh mana nilai-nilainya dihayati dan diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan secara nyata, maka Pancasila akan berubah menjadi simbol formal yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan melalui pendidikan karakter, contoh yang baik, serta dihidupkan dalam kehidupan sosial dan dunia digital, maka Pancasila bisa menjadi alat penyaring yang kuat untuk mengurangi dampak negatif dari pengaruh luar yang bertentangan dengan identitas bangsa. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa tantangan individualisme global terhadap Pancasila tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi. Pada dimensi ideologis, individualisme menggerus landasan filosofis kolektivitas yang menjadi jiwa Pancasila. Pada dimensi sosial, ia memperlemah ikatan komunitas dan solidaritas antarwarga. Pada dimensi ekonomi, ia mendorong tumbuhnya mentalitas kompetitif yang mengabaikan prinsip keadilan sosial. Pada dimensi budaya, ia mempercepat westernisasi dan mengikis identitas kultural lokal yang selama ini menjadi perekat kebhinekaan. Sementara pada dimensi teknologi, algoritma digital memperkuat echo chamber yang mengisolasi individu dari perspektif dan kepentingan orang lain. Menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi ini, respons yang diperlukan pun harus bersifat holistik dan terkoordinasi lintas sektor. Tidak ada satu pun aktor tunggal, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat sipil, yang mampu menanggung beban revitalisasi Pancasila seorang diri. Diperlukan gerakan nasional yang terstruktur dengan melibatkan semua elemen bangsa secara sinergis dan berkelanjutan. Implikasi dari kajian ini bagi dunia pendidikan sangat signifikan. Pertama, kurikulum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan perlu didesain ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata, bukan sekadar hafalan pasal dan sila. Kedua, guru sebagai ujung tombak pendidikan perlu dibekali dengan kapasitas pedagogis yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara organik dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya dalam pelajaran PKn semata. Ketiga, lingkungan sekolah perlu dikondisikan sebagai laboratorium nilai, di mana siswa mengalami langsung praktik gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan keseharian mereka di sekolah. Keempat, orang tua dan keluarga perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra sekolah dalam memperkuat internalisasi nilai Pancasila di rumah, mengingat bahwa pengaruh lingkungan keluarga terbukti paling kuat dalam pembentukan karakter anak.

Dengan mereformasi pendidikan secara menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan generasi Indonesia ke depan akan memiliki identitas Pancasila yang kokoh dan tidak mudah terbawa arus individualisme global. Sebagai penutup, penelitian ini mengakui sejumlah keterbatasan yang perlu ditindaklanjuti oleh penelitian berikutnya. Pertama, kajian ini bersifat kualitatif-studi literatur sehingga tidak menghasilkan data empiris yang dapat mengukur secara kuantitatif seberapa jauh tingkat internalisasi nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Penelitian lanjutan dengan pendekatan survei nasional atau studi kasus multi-situs sangat diperlukan untuk melengkapi temuan kajian ini. Kedua, kajian ini lebih banyak membahas tantangan di tingkat makro-sosial dan belum secara mendalam mengeksplorasi variasi pengalaman di tingkat komunitas atau daerah yang mungkin memiliki dinamika berbeda. Oleh karena itu, penelitian etnografis di tingkat komunitas yang spesifik akan memberikan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa. Ketiga, kajian ini belum secara khusus membandingkan efektivitas berbagai pendekatan revitalisasi Pancasila yang selama ini telah dicoba, sehingga penelitian evaluatif di masa mendatang dapat memberikan panduan yang lebih praktis bagi para pembuat kebijakan. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang berarti bagi upaya bersama mempertahankan Pancasila sebagai jiwa dan karakter bangsa Indonesia di tengah arus deras perubahan global. Rekomendasi yang dapat dirumuskan dari kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan memberikan mandat yang lebih konkret dan anggaran yang memadai untuk menjalankan program revitalisasi Pancasila yang terukur dan berbasis bukti. Kedua, platform media sosial yang beroperasi di Indonesia perlu didorong melalui regulasi dan kerja sama sukarela untuk menerapkan kebijakan konten yang lebih berpihak pada nilai-nilai kebangsaan dan anti-ujaran kebencian. Ketiga, lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi perlu didorong untuk memperbanyak kajian empiris tentang dinamika nilai Pancasila di masyarakat, agar kebijakan revitalisasi didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Keempat, komunitas-komunitas adat, keagamaan, dan kepemudaan perlu diberikan ruang dan dukungan untuk mengembangkan model-model revitalisasi nilai Pancasila yang organik dan sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Kelima, media massa nasional perlu didorong untuk lebih aktif memproduksi dan menayangkan konten-konten yang merayakan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keberagaman yang mencerminkan semangat Pancasila. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mempertahankan Pancasila bukan sekadar sebagai simbol sejarah, melainkan sebagai benteng ideologi hidup yang terus relevan dan menginspirasi generasi demi generasi bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan zaman. Karena itu, keberadaan Pancasila sebagai pelindung ideologi sangat tergantung pada sejauh mana nilai-nilainya benar-benar diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama oleh generasi muda. Upaya revitalisasi sangat penting, khususnya dengan memperkuat pendidikan karakter yang didasarkan pada Pancasila, meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bijak, serta ditunjukkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai contoh yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga harus digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan sesuai dengan situasi saat ini agar lebih mudah diterima oleh generasi masa kini. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol normatif saja, tetapi juga bisa berubah menjadi pedoman hidup yang nyata dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya, bisa disimpulkan bahwa Pancasila akan tetap menjadi pelindung yang kuat dalam menghadapi pengaruh individualisme global, asalkan nilai-nilainya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika nilai-nilai tersebut tidak dihayati, maka Pancasila bisa kehilangan maknanya dan hanya menjadi simbol yang tidak memiliki daya untuk menjaga identitas bangsa.

Referensi

1. Faturahmat, Azzahra, I. R., Ulumudin, Z. I., & Maharani, K. M. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *JHN: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(1), 13-22.
2. Hasanah, A., & Agusti. (2025). Peran Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
3. Mukhbata Alya, Wulandari, P., & Shifa, D. R. (2024). Individualisme Melunturkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 1(5), 240-243.
4. Pramudita, O. (2024). Dampak Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme di Era Digital. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 4(1), 19-24.
5. Ristake, A., dkk. (2024). *Peran Pancasila sebagai Dasar Hukum Nasional dalam Menyaring Pengaruh Negatif Budaya Asing di Era Globalisasi*. ResearchGate Publication.
6. Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176.
7. Syamsuar, & Akansya, R. (2019). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Eureka Media Aksara.
8. Vania, A., dkk. (2021). Revitalisasi Pancasila dalam Memfilter Dampak Globalisasi dan Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 2580-1147.
9. Kholid, A. (2020). Krisis Identitas Nasional Generasi Muda di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 45-58.
10. Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

11. Nugroho, H. (2021). Individualisme dan Erosi Solidaritas Sosial di Era Digital: Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 3(1), 12-27.
12. Rahayu, S., & Kurniawan, D. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Orientasi Individualistik Remaja Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(1), 33-47.
13. Silitonga, P. (2020). Peran Negara dalam Penguatan Identitas Nasional Melalui Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 78-94.
14. Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara.
15. Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
16. Alaby, M. A. (2019). Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Karakter Bangsa di Era Globalisasi. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 101-115.